



**RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2022 merupakan penjabaran operasionalisasi yang disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional, yang perlu dilakukan dalam jangka waktu pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Dokumen Renja menjadi instrumen penting dan strategis bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahap pembangunan daerah.

Renja OPD memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta kerangka pendanaan. Renja OPD secara substansial harus sesuai dengan rencana resmi RKPD, RPJMD dan Renstra OPD serta memberikan informasi tentang program prioritas, usulan kegiatan dan keluaran (*output*) maupun sumber pendanaan yang bersifat indikatif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian

Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Grobogan memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dimaksudkan untuk menetapkan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

D. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari :

- A. Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 memuat :

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran

- A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan beserta Indikator, Target dan Pagu Indikatifnya untuk Tahun 2022.

BAB V Penutup, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan pada Tahun 2021 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 157.119.626.142,00 termasuk di dalamnya DAK Jalan Rp. 19.814.005.000,00 dan DAK Irigasi Rp. 7.550.000.000,00.

Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 4 (empat) program urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.391.000.000,00.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggrana sebesar Rp. 4.977.000.000,00
3. Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.930.280.000,00.
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00.

Disamping program urusan wajib tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.421.346.142,00 termasuk di dalamnya belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 10.421.346.142,00.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja ditampilkan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian
Renstra PD s/d Tahun 2021**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan tahun 2022
					Target renja SKPD tahun 2021	Realisasi renja SKPD tahun 2021	Tingkat realisasi (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase areal irigasi terairi dengan baik	84,56 %	85,00 %	85,12 %	100,14 %	85,50 %
			persentase daerah bebas banjir	87,47 %	88,33%	88,87 %	100,61 %	89,16 %
1	3 02 2 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan	87,47 %	88,33%	88,87 %	100,61 %	89,16 %
1	3 02 2 01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 bh	2 bh	2 bh	100 %	2 bh
1	3 02 2 01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3,88 km	3,5 km	3,5 km	100 %	4 km
1	3 02 2 01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	3,85 km	25 km	25 km	100 %	26 km
1	3 02 2 01 51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	11 bh	-	-	-	5 bh
1	3 02 2 01	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik (PMDN 86/2017)	84,56 %	85,00 %	85,12 %	100,14 %	85,50 %
1	3 02 2 01 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	11.121 m'	8.261 m'	8.261 m'	100 %	9.086 m'
1	3 02 2 01 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	4.500 m'	4.500 m'	100 %	5.100 m'
1	3 02 2 01 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 bh	30 bh	30 bh	100 %	36 bh
1	3 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	65,40 %	64 %	65,43 %	102,23 %	65,00 %
1	3 06 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik					
1	3 06 2 01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2,049 km	2 km	2 km	100 %	2 km
1	3 06 2 01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	5 km	5 km	100 %	10 km
1	3 10	Program Penyelenggaran Jalan		78,91 %	84,51 %	84,82 %	100,37 %	85,17 %
1	3 10 2 01	Penyelenggaraan Jalan			14,15 km			

					Kabupaten/Kota							
1	3	10	2	01	01	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya dokumen perencanaan jalan dan jembatan	6 paket				
1	3	10	2	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen survey kondisi jalan dan jembatan	-	2 dok	2 dok	100 %	
1	3	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan kabupaten	4,97 km	14,13 km	14,13 km	100 %	
1	3	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	3,50 km	19,21 km	19,21 km	100 %	
1	3	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan	1 bh	24 m'	24 m'	100 %	
1	3	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi jembatan	1 bh	3 bh	3 bh	100 %	
1	3	10	2	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	-	9 bh	9 bh	100 %	
1	3	12				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang				33,00 %	
1	3	12	2	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun				3 dok	
1	3	12	2	01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	-	2 dok	2 dok	100 %	3 dok

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

No.	Indikator	Target Renstra (%)		Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	
		2020	2021	2020	2021	2022	
1	Persentase areal irigasi terairi dengan baik	84,51	85,00	84,56	85,12	85,50	
2	Persentase daerah bebas banjir	78,00	80,00	87,47	80,46	89,16	
3	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	76,08	84,51	78,91	84,82	85,17	
4	Persentase Drainase kondisi baik	63,00	64,00	65,40	64,14	65,00	

5	Persentase Ketersediaan Dokumen dan Penataan Ruang	Perencanaan Pengendalian	-	-	-	-	33,00	
---	--	--------------------------	---	---	---	---	-------	--

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPUPR dan Analisis Kinerja Pelayanan DPUPR, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaran sumberdaya air, jalan, jembatan, dan drainase wilayah.
2. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan gedung.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Rincian Reviu rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program	Lokasi	Indikator Kerja	Target (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program	Lokasi	Indikator Kerja	Target	Kebutuhan (Rp.000)	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Grobogan	Persentase areal irigasi terairi dengan baik	85,00	19.074.209	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Grobogan	Persentase areal irigasi terairi dengan baik	85,00	20.210.324	
			persentase daerah bebas banjir	89,16	29.040.400			persentase daerah bebas banjir	89,16	29.040.500	
2	Program Pengelolaan dan	Kab. Grobogan	Persentase Drainase kondisi baik	64,00	7.450.000	Program Pengelolaan dan	Kab. Grobogan	Persentase Drainase kondisi baik	64,00	7.450.000	

	Pengembangan Sistem Drainase				Pengembangan Sistem Drainase					
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Kab. Grobogan	Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	70,00	500.000	Program Penataan Bangunan Gedung	Kab. Grobogan	Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	70,00	500.000
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab. Grobogan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	80,45	197.370.352	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab. Grobogan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	80,45	193.066.356
			Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	71,27	4.494.897,771			Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	71,27	4.696.952
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Grobogan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	33,00	1.459.000	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Grobogan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	33,00	1.459.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan kebijakan Nasional adalah Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Prioritas Nasional 5 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sedangkan kebijakan dan strategi juga mendukung bidang Kebinamargaan dan Penataan Ruang selaras dengan kebijakan Nasional adalah Prioritas 2 yaitu Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman untuk mendukung Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Renja ini juga terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dimana masuk dalam Matriks Rencana Strategis Dirjen Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2. Sasaran

Sasaran pengelolaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 meliputi :

- a. Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Air
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan dan drainase perkotaan
- c. Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta penataan bangunan gedung
- d. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 merupakan penjabaran dari Strategi dan Kebijakan dalam rencana kerja tahun ***pertama*** dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 11 (sebelas) program, sedang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan melaksanakan rencana program dan kegiatan tahun 2022 melalui 5 (lima) program, terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Penataan Bangunan Gedung
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Di samping program teknis tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2022 didukung 1 (satu) program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Pagu Indikatif 2022 (dalam ribuan)
						Tolok ukur	Target		
1	03				Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	85,50 %	Kab. Grobogan	48.114.709
						persentase daerah bebas banjir	89,16 %		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang diperkuat			29.040.500
1	03	02	2.01	10	Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Panjang tebing sungai yang dibangun	4 km		15.269.500
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/restorasi sungai	Panjang sungai yang di normalisasi	26 km		13.021.000
1	03	02	2.01	65	Operasi dan pemeliharaan sungai	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	4 km		750.000
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sistem irigasi yang dikelola	85,50 %		
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 keg		251.500
1	03	02	2.02	08	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	9.086 m'		11.966.900
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	25 pintu		3.555.809
1	03	02	2.02	21	Operasi dan pemeliharaan	Panjang jaringan irigasi	5.100		2.600.000

					jaringan irigasi permukaan	permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	m'		
1	03	02	2.02	22	Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi	Jumlah bendung irigasi yang operasikan dan dipelihara	36 bh		700.000
1	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik	65 %	Kab. Grobogan	7.450.000
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab./Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	65%		7.450.000
1	03	06	2.01	05	Pembangunan sistem drainase perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	2 km		6.950.000
1	03	06	2.01	09	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	10 km		500.000
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	85,17 %	Kab. Grobogan	201.865.249,7 71
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kondisi baik			201.865.249,7 71
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 dok		961.885
1	03	10	2.01	05	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	43,32 km		173.507.475
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	51,3 km		15.423.377
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan jembatan Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	24,4 km		7.477.615
1	03	10	2.01	12	Pembangunan jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	60 m'		3.544.897,771
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan jembatan rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Ruti	12 bh		950.000

1	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	33 %	Kab. Grobogan	1.459.000
1	03	12	2.02		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota yang disusun	5 dok		1.156.000
1	03	12	2.02	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 dok		1.156.000
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pemanfaatan ruang yang disusun	3 kali		303.000
1	03	12	2.03	02	Sistem informasi penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	3 kali		303.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan, guna menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan serta sasaran dan target pembangunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan menjadi instrumen perencanaan yang memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan pedoman dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Grobogan, khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.

Purwodadi,

2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

